BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi di negara Indonesia sangatlah cepat terutama di bidang teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan suatu acuan bagi negara Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Perkembangan teknologi yang ada di suatu pemerintahan disebut dengan *e-Government*. Pemerintah memfokuskan diri pada teknologi, khususnya pengembangan *e-Government* yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan serba cepat menuntut pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerja aparaturnya sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Lemahnya pelayanan aparatur pemerintah, menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya negatif, berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sehingga kurang dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Tuntutan masyarakat terhadap transparasi penyelenggaraan pembangunan semakin tinggi, terlebih lagi pascareformasi sejak tahun 1997. Akuntabilitas dan transparasi memang harus dimiliki oleh setiap penyelenggara pembangunan. Bentuk tuntutan tentang akuntabilitas dan

transparasi dalam organisasi adalah kualitas kinerja pelayanan publik karena misi organisasi pemerintah adalah memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat

Kemajuan Sistem Informasi terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan keseluruh lapisan masyarakat dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara apapun.

Pesatnya perkembangan sistem informasi menuntut kita harus selalu mengikuti *trend* sistem informasi sekarang dan masa yang akan datang. Salah satu implikasi nyata yang dirasakan dari percepatan tersebut saat ini adalah munculnya berbagai bidang baru yang menuntut penguasaan teknologi informasi didalamnya.

Sistem Informasi yang berkembang pesat sekarang ini sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah dimasa modern harus bersikap dalam melayani masyarakatnya. Inilah alasan lain mengapa di dinas perhubungan provinsi jawa barat dipaksa untuk mulai mengkaji fenomena yang ada agar yang bersangkutan dapat secara benar dan efektif mereposisikan peranan dalam melayani masyarakat.

Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya, namun juga yang diberikan pemerintah secara efektif dan

efesien. Hubungan yang erat antara dinas perhubungan provinsi jawa barat dan masyarakat sebagai pihak yang harus diperhitungkan kesejahteraan dan kualitas kehidupannya haruslah diimbangi dengan peran pemerintah dan bisa memberikan sebuah standar pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu.

Dunia informasi merupakan suatu fenomena didalam kehidupan baik di Dinas Perhubunga Provinsi Jawa Barat maupun dilingkungan masyarakat. Hal ini karena semakin majunya suatu negara atau daerah maka harus semakin efektif pelayanan sistem informasi baik dari segi sektor ekonomi , politik, perdagangan , budaya maupun sosial, oleh sebab itu, di dinas perhubungan provinsi jawa barat dalam meningkatakan kualitas kinerjanya dituntut untuk lebih efektif dan efesien, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan trasparansi .

Kinerja di dinas perhubungan provinsi jawa barat pun hendaknya ditingkatkan melalui suatu media teknologi yang semakin maju, ini dapat menunjang kinerja lebih efektif dan efesien sehingga terciptanya *good governance*. Banyak media informasi dan teknologi yang dapat dipergunakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Perlu didukung dengan penggunaan teknologi dan informasi yang lebih kompetitif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dewasa ini teknologi informasi sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting, tidak hanya sebagai tuntutan yang sangat mendesak bagi setiap orang, tetapi digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cepat, lengkap dan akurat. Perkembangan sistem informasi memberi dampak pada bidang pelayanan dan penyampaian informasi dari dinas perhubungan provinsi jawa barat kepada masyarakat.

Website merupakan salah satu media yang saat ini banyak digunakan dalam penyampaian informasi disuatu negara, kota, kantor maupun sarana pribadi. Perkembangan *website* yang semakin lama semakin maju dan diperluas pemanfaatannya sebagai media komunikasi jarak jauh baik secara langsung maupun tidak langsung yang cepat dan dinamis.

Fasilitas-fasiltas, tampilan *website* yang dinamis, data-data yang lengkap terutama informasi yang berhubungan dengan dinas perhubungan provinsi jawa barat khususnya informasi yang ditampilkan dalam *web site* menjadi media penyampaian informasi dan promosi mengenai keunggulan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Maka untuk itu berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil topik usulan penelitian dengan judul **“ Kinerja Aparatur Dalam Melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian Di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ”**

1.2 Identifikasi Masalah

Maksud dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dalam Melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian.

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Bagaimana keluaran *(Output)* yang dapat menentukan keberhasilan Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan sistem informasi kepegawaian?
2. Bagaimana hasil Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam Melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian?
3. Bagaimana Kaitan Usaha dengan Pencapaian dalam menjalankan Kinerja Aparatur Dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat Dalam Melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian?
4. Bagaimana Informasi Penjelas yang mempengaruhi Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dalam Melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian?

1.3 Maksud dan Tujuan KKL

Maksud dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana pengembangan sistem informasi kepegawaian dalam meningkatkan efektivitas kinerja pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan tujuanya adalah :

1. Untuk mengetahui keluaran *(Output)* yang dilaksanakan yang dapat menentukan keberhasilan Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dalam Melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian.
2. Untuk mengetahui hasil Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dalam Melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian .
3. Untuk mengetahui Kaitan Usaha dengan Pencapaian dalam menjalankan Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dalam Melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian.
4. Untuk mengetahui Informasi Penjelas yang mempengaruhi Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dalam Melaksanakan Sistem Informasi Kepegawaian.

1.4 Kegunaan KKL

Hasil kegunaan penulisan ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Guna teoritis, dalam rangka mengembangkan konsep-konsep atau teori-teori melalui penulisan ke lapangan. Dimana dalam penulisan ini, diharapkan akan memberikan sumbangan ilmu serta dapat dijadikan bahan tinjauan awal untuk melakukan penulisan serupa dimasa yang akan datang.
2. Guna praktis, diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas kinerja pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, khususnya dibidang sistem informasi kepegawaian dalam memberikan pelayanan informasi secara efektif dan efesien.

1.5 Kerangka Pemikiran

Peningkatan kinerja aparatur pemerintah melalui penggunaan teknologi dan informasi pada instansi pemerintah akan menghasilkan kualitas kerja yang produktif dan tepat guna. Aplikasi *e-Government* tidak akan berjalan sempurna apabila tidak selalu d imbangi dengan SDM yang memadai dan kinerja yang efektif. Menurut Baban Sobandi dan kawan-kawan “Kinerja merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input, output, outcome, benefit, maupun impact*.” (Sobandi dkk, 2006:176). Hasil kerja yang dicapai oleh aparatur suatu instansi dalam menjalankan tugasnya

dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input, output, outcome, benefit,* maupun *impact* dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh aparatur dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.

Organisasi pemerintahan menggunakan alat untuk mengukur suatu kinerja birokrasi publik, teori yang digunakan yaitu teori kinerja dari Baban Sobandi dan para ahli lainnya dalam bukunya yang berjudul *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah* sebagai berikut:

1. Keluaran *(Output)*
2. Hasil
3. Kaitan Usaha dengan Pencapaian
4. Informasi Penjelas

(Sobandi dkk, 2006 : 179-181)

Pertama*, output* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik yang diharapkan oleh suatu organisasi atau instansi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kedua*,* hasil adalah mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian layanan. segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Maka segala sesuatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada

jangka menengah oleh suatu organisasi atau instansi harus dapat memberikan efek langsung dari kegiatan tersebut.

Ketiga, kaitan usaha dengan pencapaian adalah ukuran efisiensi yang mengkaitkan usaha dengan keluaran pelayanan. Berdasarkan pengertian diatas, maka Mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, dan memberi informasi tentang keluaran di tingkat tertentu dari penggunaan sumber daya, menunjukan efisiensi relatif suatu unit jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, tujuan yang ditetapkan secara internal, norma atau standar yang bias diterima atau hasil yang bisa dicapai oleh organisasi yang setara.

Keempat, informasi penjelas adalah suatu informasi yang harus disertakan dalam pelaporan kinerja yang mencakup informasi kuantitatif dan naratif. Membantu pengguna untuk memahami ukuran kinerja yang dilaporkan, menilai kinerja organisasi, dan mengevaluasi signifikansi faktor yang akan mempengaruhi kinerja yang dilaporkan.

Peningkatan pelayanan kinerja aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Aparatur suatu instansi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya harus dilandasi dengan rasa penuh tanggung jawab, agar terciptanya kualitas suatu kinerja yang optimal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pada umunya.

Sistem informasi merupakan bentuk penerapan dalam sebuah organisasi, dimana penerapan/penggunaan sistem informasi dalam sebuah organisasi tersebut untuk mendukung dalam mengumpulkan dan mengolah data dan menyediakan informasi yang berguna di dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Suatu organisasi yang tumbuh dan menjadi lebih kompleks membuat manajemen melakukan permintaan yang semakin besar terhadap fungsi sistem informasi. Mereka membutuhkan untuk dapat melakukan akses terhadap data kapanpun dan dimanapun dengan mudah, akurat dan konsisten, sistem informasi yang cepat dapat mengikuti perubahan kondisi. Menurut pendapat Tata Sutabri dalam bukunya *Sistem Informasi Manajemen* mendefinisikan sistem informasi, sebagai berikut:

> "Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi, yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan" (Sutabri, 2005:42).

Dengan demikian sistem informasi adalah suatu sistem manusia/mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem informasi adalah (kesatuan) formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik maupun logika. Dari organisasi ke organisasi, sumber daya ini disusun atau distrukturkan dengan beberapa

cara yang berlainan, karena organisasi dan sistem informasi merupakan sumber daya yang bersifat dinamis.

Lebih lanjut menurut pendapat James B Bower dkk dalam bukunya *Computer Oriented Accounting Informations System* yang dikutip Teguh wahyono dalam bukunya *Sistem Informasi Konsep Dasar, Analisi Desain dan Implementasi* menjelaskan pengertian sistem informasi, sebagai berikut:

> "Sistem informasi merupakan suatu cara tertentu untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk beroperasi dengan cara yang sukses dan untuk organisasi bisnis dengan cara yang menguntungkan" (Wahyono, 2004:17).

Jadi berdasarkan pengertian diatas, sistem informasi merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi tersebut untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi dan pengendalian.

Pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah. Unsur manusia sebagai pegawai maka tujuan badan (wadah yang telah ditentukan) kemungkinan besar akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pegawai inilah yang mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Peningkatan pelayanan kinerja aparatur dalam melaksanakan Sitem Informasi kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

kepada masyarakat merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Aparatur suatu instansi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya harus dilandasi dengan rasa penuh tanggung jawab, agar terciptanya kualitas suatu kinerja yang optimal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pada umunya.

Dengan hadirnya sistem informasi ini, dinas perhubungan provinsi jawa barat mengharapkan setiap masyarakat pada umumnya dapat mengakses langsung informasi. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berkomitmen mewujudkan *good governance* sesuai dengan visi dan misi pemerintah provinsi jawa barat, serta mewujudkan kebersamaan dalam membangun pemerintah provinsi jawa barat melalui pembinaan tali silaturahim, penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengelolaan sumber daya alam (SDA), secara optimal.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka definisi operasional dalam penulisan laporan KKL ini adalah :

1. Kinerja adalah merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input, output, outcome, benefit, maupun impact.*
    1. *Output* adalah sesuatu hasil yang dihasilkan langsung dirasakan dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik *Output* Meliputi:
        a) Kualitas Pelayanan yang diberikan adalah bagaimana kualitas

pelayanan yang diberikan oleh aparatur

b) Kuantitas pelayanan yang diberikan adalah bagaimana kuantitas

pelayanan yang diberikan oleh aparatur

2. Hasil adalah mengukur pencapaian atau hasil yang diberikan dalam pemberian layanan. Segala sesuatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada jangka menengah harus dapat memberikan efek langsung dari kegiatan tersebut.

3. Kaitan Usaha dengan Pencapaian adalah mengukur sumber daya yang digunakan oleh aparatur dan memberi informasi dari hasil penggunaan sumber daya tersebut yang membandingkan hasil yang dicapai sekarang dengan hasil yang sebelumnya secara internal, norma atau standar yang bias diterima atau hasil yang bisa dicapai oleh organisasi yang setara. Kaitan usaha dengan pencapaian meliputi:

a) Efisiensi yang mengkaitkan usaha dengan keluaran pelayanan adalah mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, dan memberi informasi tentang keluaran ditingkat tertentu dari penggunaan sumber daya, menunjukan efisiensi relatif suatu unit jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, tujuan yang ditetapkan secara internal, norma atau standar yang bisa diterima, atau hasil yang bias dicapai oleh organisasi yang setara.

b) Biaya yaitu hasil yang menghubungkan usaha dan hasil pelayanan. Ukuran ini melaporkan biaya per unit hasil, dan mengaitkan biaya dengan hasil sehingga manajemen publik dan masyarakat bias mengukur nilai pelayanan yang telah diberikan.

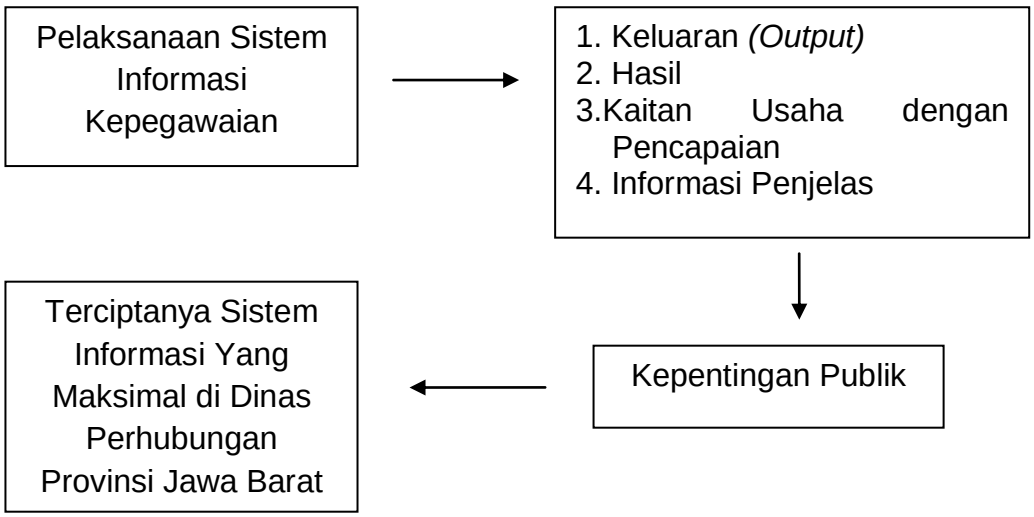
4. Informasi Penjelas adalah suatu hasil berupa informasi yang ada dan disertakan dalam pelaporan kinerja yang mencakup informasi kuantitatif dan naratif yang bisa membantu pengguna untuk memahami ukuran kinerja yang dilaporkan, menilai kinerja organisasi, dan mengevaluasi faktor yang akan mempengaruhi kinerja yang dilaporkan. Informasi penjelas meliputi :

   a. Faktor Subtansial adalah faktor yang ada diluar kontrol, seperti karateristik lingkungan dan demografi.
   b. Faktor yang dapat dikontrol adalah faktor yang dapat dikontrol seperti pengadaan staf.

2. Aparatur adalah seseorang yang digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah secara teknis dengan berdasarkan ketentuan yang ada, sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian untuk mencapai tujuan.

Adapun model kerangka pemikiran sebagai berikut :

Bagan 1.2
Model Kerangka Pemikiran



1.6. Metode Penulisan

1.6.1 Metode Laporan KKL

Sesuai dengan masalah yang ditulis pada laporan KKL ini, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusun dalam melakukan penulisan dan pengamatan secara benar.

Pada penulisan KKL ini penulis menggunakan metode deskriftif . Pengertian metode deskriftif adalah :

> ”Penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul dimasyarakat yang menjadi permasalahannya itu, kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variable tertentu. Penelitian deskriftif dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang bertipe kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian”. (Burhan bungin,2001:124).

Berdasarkan pengertian itu, maka metode deskriptif menggambarkan tentang pengembangan sistem informasi kepegawaian dalam rangka menunjang efektivitas kinerja pegawai di dinas perhubungan provinsi jawa barat, dalam meningkatkan pelayanan sistem informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk dianalisa dan interpretasi terhadap data tersebut.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan berbagai macam data, untuk memperjelas usulan penelitian, data diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Observasi

   Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi yaitu menulis, melihat langsung kelapangan dengan pengamatan dan mencatat terhadap gejala-gejala yang diteliti yang berhubungan dengan efektivitas pengembangan sistem informasi dalam meningkatkan pelayanan informasi dalam menunjang efektivitas kinerja pegawai di dinas perhubungan provinsi jawa barat.

b) Studi Pustaka

Penggunaan studi pustaka sangat dibutuhkan penulis untuk menambah wawasan berkenaan dengan teori-teori yang digunakan. Studi pustaka merupakan pengambilan data berupa referensi berdasarkan buku yang berkaitan dengan *e-government*, sistem informasi Kepegawaian dan kinerja kepegawaian. Studi pustaka ini didapat dari buku, artikel dan dokumentasi untuk dikumpulkan sebagai teori yang dijadikan landasan dalam menyusun usulan penelitian.

1.6.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai strategi penyelidikan yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana *setting* tanpa hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Teori muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar *grounded* dalam data (Bagong Suyatna, 2005:183).

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan ini ada tiga teknik, dikutip dari Sugiyono dengan bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif*, ketiga teknik tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi Data

   Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

   Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

   Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif.

1.7 Lokasi dan Waktu KKL

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Bagian Jalan Sukabumi No.1 Telp. 7207257-7272258 Bandung 40132.

Jadwal KKL tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2011				
		Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1	Mengajukan surat ke Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat					
2	Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan					
3	Pengumpulan data					
4	Penulisan laporan					
5	Pengumpulan laporan					